**ABSTRAK**

Thelma Wawointana. Disertasi. Pengembangan Kelembagaan di Sektor Publik (Studi Kasus Peran “Mapalus” dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan: Peran institusi lokal “Mapalus” sebagai basis penciptaan nilai pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas); Bentuk partisipasi publik dalam menciptakan Kamtibmas; Faktor-faktor institusional yang mendukung dan menghambat peran ‘Mapalus’ dalam menciptakan Kambitmas; Strategi pengembangan Forum Mapalus sebagai wahana menciptakan Kamtibmas. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan secara sengaja berdasarkan derajat keterlibatan dan pemahamannya terhadap fokus masalah.

Hasil penelitian menemukan bahwa Mapalus merupakan nilai budaya masyarakat Minahasa dilegalisasi oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Mapalus Kamtibmas. Forum Mapalus Kantibmas melibatkan aparat pemerintah desa/kelurahan, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan tokoh masyarakat. Forum Mapalus Kamtibmas belum berperan secara optimal sebagai basis penciptaan nilai pelayanan publik di bidang Kamtibmas. Penyebabnya, antara lain, adalah peran Pemerintah Daerah yang lemah dalam menginternalisasikan nilai-nilai lokal Mapalus ke dalam formulasi dan implementasi kebijakan, serta faktor pendanaan/anggaran dan pengelolaannya yang kurang transparan, sumber daya manusia yang kurang memiliki kompetensi, dan sikap Pemerintah Daerah yang kurang responsif. Forum Mapalus Kamtibmas belum terimplementasi dengan baik disebabkan faktor sosialisasi, koordinasi, dan pendanaan, sehingga kegiatannya belum efisien dan efektif. Kesadaran masyarakat dan peran elit lokal masih kurang dalam berpartisipasi, demikian pula dukungan politik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kurang, serta kurangnya partisipasi publik karena sosialisasi, dan koordinasi dari pembuat kebijakan yang masih kurang. Faktor-faktor institusional yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Strategi pengembangan institusional adalah revitalisasi dan penguatan fungsi Foru mapalus kamtibmas melalui kerjasama antara Polisi, TNI, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dengan mensosialisasikan nilai budaya lokal Mapalus, serta mereformulasi isi kebijakan, mengintensifkan pelaksanaannya.

Penelitian ini merekomendasikan agar Forum Mapalus Kamtibmas dilanjutkan dan disosialisasikan secara berkelanjutan dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat, sehingga dapat terbangun partisipasi publik dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Pengembangan Kelembagaan, Forum Mapalus, Kamtibmas

**ABSTRACT**

THELMA WAWOINTANA. 2016. *Dissertation. The Institutional Development in Public Sector (A Case Study of the Role of “Mapalus” in Creating Public Security and Order in Minahasa District North Sulawesi Province) (Supervised by Haedar Akib as the promoter, Suradi Tahmir and Ferdinand Kerebungu as the co-promoters).*

 The research aims to analyze and explain: the role of local institution of *Mapalus* as a basis of creating public service value in *kamtibmas* (public security and public order); the form of public participation in creating kamtibmas; the istitutional factors which supports and hampers the role of *Mapalus* in creating *kamtibma*s; development strategy of *Mapalus* Forum as the media to create *kamtibmas*. The research is qualitative with a case study approach. Data is collected by conducting observation, documentation, and in-dept interview techniques to the informants who are chosen purposely based on the involvement degree and understanding toward the problem of the research.

 The result of the research indicates that *Mapalus* is a cultural value of Minahasa society legalized by the government through Regulation of North Sulawesi Governor, Number 8 Year 2012 on the formation of *Mapalu*s Forum for *kamtibma*s. *Mapalus* Forum for *kamtibma*s involved government apparatus of village, police, soldier, and public figure. *Mapalus* Forum for *kamtibmas* had not been served optimally as a basis in creating public service value in *kamtibmas*. The causes among others are the role of local government is weak in internalizing loval velues into the policy formulation and implementation, and less transparent concerning funds and its management, less competence human resources and less responsive attitude of local gevernment. *Mapalus* Forum for *kamtibmas* had not been implemented well due to the factors of socialization, coordination, and funding, so the activity had not been afficient and effective. Lack of participation on the awareness of society and the role of local elite as well as the political support from the member of the local legislative, and lack of public participation because of socialization, and lack of coordination from the policy maker. The institutional factors which give influence are communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. The institutional development strategies are the revitalization and srengthening of the function of *Mapalus* Forum for *kamtibmas* through cooperation with police, soldier, district government, and society by socializing local culture value of *Mapalus,* and reformulating the policy content, intensifying the implementation.

The recommendation based on the research is to continue and socialize *Mapalus* Forum for *kamtibmas* sustainably to society to be able build public participation in creating *kamtibmas.*

Keywords: *Institutional Development, Mapalus Forum, Kamtibmas*.